

INTERNALISASI NILAI KEDAMAIAN MELALUI PENDIDIKAN KEDAMAIAN SEBAGAI PENGUATAN PEMBANGUNAN KARAKTER PADA MASYARAKAT HETEROGEN

Mardan Umar

Dosen pada Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Umum Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung

Surel: mardanumar1980@gmail.com, mardanumar@student.upi.edu

Abstract

Indonesia has many diversities in many aspects. It is not only about having various ethnics but also many cultures, languages, as well as religions. The diversity must be framed in the spirit of unity in diversities by internalizing the value of peace as the embodiment of diversity. This review discusses the internalization of peace values through peace education as a strengthening of character building in heterogeneous societies in Indonesia. This discussion covers the concept of values internalization, peace education, education policy, in heterogeneous societies and the urgency of peace education recently. The main issues of this study are how to internalize the value of peace education through peace education in educational institutions and the urgency of peace education in heterogeneous societies in Indonesia and how to strengthen nation character development through peace education in order to create a peaceful life in this country.

The purpose of this study is to describe the internalization of the peace value through peace education of the urgency of peace education in the context of heterogeneous communities in Indonesia and to describe the strengthening of character building through peace education in heterogeneous societies in Indonesia to create a peaceful and safe life.

The result of this study shows that the internalization of peace values can be done by integrating the peace value through peace education, both using Religion, and Pancasila and Civil subject. The national education policy has also provided a space for heterogeneity of Indonesian society.

However the policy has not explicitly put forward peace education as an effort to maintain the harmony of national diversity. Therefore the education of peace should be put forward to strengthen the development of the heterogeneous of Indonesian character.

Keywords: *Internalization, Value, Peace, Peace Education, Character Education, Heterogeneous.*

Abstrak

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek, tidak hanya multi etnik, multi kultur, multi bahasa, juga multi agama. Keanekaragaman ini harus dibingkai dengan semangat persatuan dalam perbedaan dengan menginternalisasikan nilai-nilai kedamaian sebagai perwujudan dari kebhinekaan. Kajian ini membahas tentang internalisasi nilai kedamaian melalui pendidikan kedamaian sebagai penguatan pembangunan karakter pada masyarakat heterogen di Indonesia. Pembahasan ini mencakup konsep internalisasi nilai, pendidikan kedamaian, kebijakan pendidikan pada masyarakat heterogen, urgensi pendidikan kedamaian dalam konteks masyarakat heterogen di Indonesia. Permasalahan pokok dari kajian ini adalah bagaimana internalisasi nilai kedamaian melalui pendidikan kedamaian di lembaga pendidikan dan urgensi pendidikan kedamaian pada masyarakat heterogen di Indonesia serta bagaimana penguatan pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan kedamaian pada masyarakat yang heterogen agar tercipta kehidupan yang damai. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan internalisasi nilai kedamaian melalui pendidikan kedamaian dan urgensi pendidikan kedamaian dalam konteks masyarakat heterogen di Indonesia serta mendeskripsikan penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan kedamaian pada masyarakat heterogen di Indonesia dalam menciptakan kehidupan yang damai. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai kedamaian dapat dilakukan dengan memanfaatkan mengintegrasikan nilai kedamaian melalui pendidikan kedamaian, baik dalam mata pelajaran yang ada seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta Pendidikan Multikultural. Di sisi lain, kebijakan pendidikan nasional telah memberikan ruang bagi heterogenitas masyarakat Indonesia, namun kebijakan tersebut belum secara eksplisit mengedepankan pendidikan kedamaian sebagai upaya menjaga harmonisasi dan kedamaian hidup dalam perbedaan bangsa. Oleh karena itu, Pendidikan Kedamaian perlu dikedepankan sebagai penguatan pembangunan Karakter bangsa Indonesia yang heterogen.

Kata Kunci: *Internalisasi, Nilai, Kedamaian, Pendidikan Kedamaian, Pendidikan Karakter, Heterogen.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kedamaian hidup menjadi harapan semua manusia di berbagai belahan dunia. Dalam konteks global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *The 17 Sustainable Development Goals* tahun 2015 menempatkan kedamaian sebagai salah satu agenda universal untuk transformasi dunia baru dengan bertekad untuk mendorong masyarakat damai, adil dan inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa kedamaian dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan berkelanjutan. (The United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals*, The United Nations Summit, 2015). Isu ini sangat penting, mengingat konflik tidak pernah hilang di berbagai negara dengan berbagai alasan, baik konflik antar negara maupun konflik dalam satu negara yang melibatkan kelompok masyarakat.

Melalui rumusan di atas, PBB ingin menyampaikan bahwa pembangunan dunia tidak akan terwujud tanpa adanya kedamaian hidup, sehingga perlu ada agenda yang mendorong terciptanya kedamaian hidup dalam masyarakat global yang beraneka ragam dan heterogen. Finlandia menjadi salah satu negara yang paling nyaman dan aman untuk hidup. Begitu juga dengan Denmark dan Jerman juga masuk kategori negara yang aman bagi populasi masyarakat yang heterogen. Selain itu, Malaysia dengan keterbukaan pada keragaman etnis telah menjelma menjadi negara yang mampu bersaing di kancah regional. Demikian pula China yang dikenal sebagai negara komunis tapi sangat menghormati perbedaan termasuk perbedaan keyakinan warga negaranya.

Dalam konteks Indonesia dengan heterogenitas masyarakat perlu dimaknai sebagai kekayaan bangsa dan bukan menjadi alasan perpecahan. Semakin banyak isu yang bermunculan yang dapat memecah belah persatuan bangsa, mulai dari upaya merusak tatanan kehidupan dengan isu-isu suku, ras dan golongan sampai dengan benturan-benturan golongan agama. Selain itu, ketahanan sosial masyarakat semakin melemah seiring dengan perkembangan zaman yang makin mengikis rasa persaudaraan dan nilai-nilai kedamaian. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi masyarakat Indonesia yang begitu beragam baik dari aspek suku, ras, golongan dan agama. Pendeknya, eksistensi heterogenitas masyarakat ini perlu dimaknai sebagai kekayaan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Pada kenyataannya, nilai-nilai karakter yang selama ini melekat sebagai identitas bangsa seakan mulai luntur. Keramah-tamahan, tenggang rasa, hormat menghormati, saling membantu kini mulai tergeser dengan adanya persaingan kelompok, saling menyalahkan, saling curiga, perselisihan, konflik bahkan pembunuhan dan bentrok fisik antar kelompok masyarakat terus bermunculan. Konflik dan benturan pada masyarakat Indonesia sudah sering terjadi dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun terakhir. Tentu saja ini menjadi masalah besar bagi

bangsa Indonesia yang memiliki semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Konflik atas dasar kelompok, suku, golongan dan agama terus terjadi dan seakan menjadi ancaman laten yang setiap saat bisa terjadi dan mengancam persatuan bangsa. Iqbal (2014: 90) menyebutkan tiga kecenderungan yang sering dihadapi masyarakat multikultural yaitu: 1) mengidap potensi konflik yang kronis di dalam hubungan-hubungan antar kelompok; 2) pelaku konflik melihat sebagai *all out war*; 3) proses integrasi sosial lebih banyak terjadi melalui dominasi atas suatu kelompok oleh kelompok lain. Tantangan masyarakat yang heterogen seperti Indonesia sudah tentu adalah upaya menciptakan kedamaian hidup, meminimalisir konflik dan benturan antara kelompok, suku, golongan, komunitas, penganut dan pemeluk agama tertentu.

Oleh sebab itu, setiap warga negara harus dididik, ditanamkan dan dibina dengan semangat kedamaian hidup dalam keragaman, menghormati dan menghargai perbedaan, tetap saling bekerja sama dalam urusan sosial, menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dalam iklim yang kondusif sebagai kekuatan karakter bangsa. Upaya pembinaan itu harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan terencana dengan baik, salah satunya melalui pendidikan. Sebab melalui pendidikan, warga negara dapat ditanamkan nilai-nilai kedamaian, penghargaan dalam perbedaan, menghormati, mencintai sesama sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Keberadaan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Pendidikan Multikultural perlu diperkuat dengan Pendidikan Kedamaian. Dengan demikian, proses pendidikan harus diyakini sebagai sarana yang tepat untuk membina dan menanamkan nilai kedamaian dan nilai-nilai luhur kehidupan bersama dalam perbedaan.

Di sinilah pemerintah dituntut melahirkan kebijakan pendidikan yang lebih futuristik dan antisipatif serta mampu mempertimbangkan aspek heterogenitas masyarakat Indonesia. Diawali dengan kebijakan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Kemudian pemerataan pendidikan termasuk mutu dan anggaran pendidikan, kebijakan tentang hak dan kewajiban memperoleh pendidikan agama pada semua pemeluk agama, pendidikan yang berbasis kearifan lokal dan lain sebagainya. Semuanya perlu diarahkan pada penciptaan kondisi hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis dan penuh dengan kedamaian.

Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini dianggap penting dan relevan untuk mengedepankan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kedamaian hidup dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen sebagai penguatan pendidikan karakter. Apakah kebijakan pendidikan di Indonesia sudah memiliki orientasi untuk menjaga persaudaraan, mengantisipasi konflik dan menjamin kehidupan yang damai atau pendidikan dengan nilai-nilai kedamaian belum menjadi prioritas utama. Menurut hemat penulis, konsep pendidikan kedamaian sangat urgen bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Oleh sebab itu, kajian ini bertujuan untuk mengungkap urgensi nilai kedamaian dan mengkaji kebijakan pendidikan dalam konteks masyarakat heterogen di Indonesia, mendeskripsikan heterogenitas bangsa Indonesia dan memberikan solusi alternatif implementasi pendidikan kedamaian dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.

B. Kajian Konseptual

1. Internalisasi Nilai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata internalisasi diartikan sebagai penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku (Depdiknas, 2008: 543). Selain itu, dalam Ensiklopedi Indonesia (1989: 196-197) disebutkan bahwa internalisasi adalah proses yang dialami seseorang dalam menerima dan menjadi bagian milik dirinya pelbagai sikap, cara mengungkapkan perasaan atau emosi, pemenuhan hasrat, keinginan, nafsu, keyakinan, norma-norma, nilai-nilai sebagaimana yang dimiliki individu-individu lain dalam kelompoknya. Pengertian ini sesuai dengan pandangan Hakam (2015: 7), yang menerjemahkan proses internalisasi merupakan upaya menghadirkan sesuatu (nilai) yang asalnya ada pada dunia eksternal menjadi milik internal baik bagi seseorang atau lembaga. Demikian pula, Bloom et.al (1971: 29) menjelaskan internalisasi adalah: *as incorporating something within the mind or body; adopting as one's own the ideas, practice, standard, or values of another person or society* atau proses menyatukan sesuatu ke dalam pikiran atau badan; mengadopsi gagasan praktik, standar atau nilai-nilai orang lain atau masyarakat sebagai milik diri sendiri.

Lickona (1992: 53) juga memberikan pengertian bahwa internalisasi nilai merupakan proses pematapan dan penanaman keyakinan, sikap, nilai pada diri individu sehingga nilai-nilai tersebut menjadi perilakunya (*moral behaviour*). Internalisasi pada dasarnya merupakan proses belajar. Seseorang belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala pengetahuan, sikap-sikap, perasaan, dan nilai-nilai. Sejak lahir hingga meninggal dunia seseorang belajar dari pola pandangan, tindakan dan berinteraksi dengan segala macam individu dan lingkungan alam yang ada di sekelilingnya. Lingkungan pendidikan baik informal, formal dan nonformal memberikan berbagai pengetahuan, mengembangkan perasaan, emosi, motivasi, kemauan, keterampilan, nilai-nilai untuk menginternalisasikan semua itu dalam kepribadiannya. Internalisasi lebih mengarah pada aspek individu.

Proses internalisasi nilai dapat dilakukan melalui tahapan transformasi nilai, transaksi nilai dan tahap trans-internalisasi nilai. Tahap transformasi nilai adalah proses yang dilakukan pendidik untuk menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik melalui proses komunikasi verbal. Sehingga proses ini hanya merupakan proses transformasi pengetahuan (kognitif) tentang suatu nilai tertentu. Sementara tahap transaksi nilai merupakan proses penginternalisasian nilai melalui komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik secara timbal balik, sehingga terjadi proses interaksi. Proses ini memungkinkan pendidik mempengaruhi nilai peserta didik melalui contoh nilai yang dijalankannya (*modelling*) sedangkan peserta didik dapat menerima nilai baru disesuaikan dengan nilai dirinya. Selanjutnya, tahap trans-internalisasi yaitu proses penginternalisasian nilai melalui proses yang bukan hanya komunikasi verbal tetapi juga disertai komunikasi kepribadian yang ditampilkan oleh pendidik melalui ketela-

danan, melalui pengkondisian serta melalui proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai yang diharapkan. Sehingga peserta didik diajak untuk memahami nilai, dilatih untuk mengaktualisasikan nilai, mendapat contoh kongkrit dalam mengimplementasikan nilai, membiasakan dan mengaktualisasikan nilai. Dalam konteks ini, internalisasi nilai mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor (Hakam, 2015: 13-14).

Dengan demikian, internalisasi nilai tidak hanya mencakup satu arah saja melainkan dua arah bahkan multi arah. Pendidik sebagai agen yang menginternalisasikan nilai tertentu kepada peserta didik melalui transformasi pengetahuan (kognitif) kemudian dikomunikasikan bersama termasuk di dalamnya *modelling* atau pemodean dan selanjutnya melalui proses tran internalisasi yaitu dengan keteladanan, pengkondisian, pembiasaan sesuai dengan perilaku atau nilai yang diinternalisasikan. Sehingga internalisasi nilai menjadi suatu proses yang komprehensif dan meliputi semua ranah dalam pendidikan.

Nilai sebagai suatu ide, konsep dan kepercayaan yang dijadikan patokan untuk menentukan dan memutuskan suatu pilihan yang dijadikan pandangan hidup baik dalam berpikir dan bertindak tentang sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Ruang lingkupnya meliputi seluruh sisi kehidupan sebab tidak ada satu wilayah yang bebas nilai, termasuk dalam pendidikan. Semuanya terikat oleh nilai-nilai yang diyakini kebenaran dan disepakati bersama. Sebagaimana dikemukakan oleh Kneller (1971: 26) bahwa “*Values abound everywhere in education; they are involved in every aspect of school practice; they are basic to all matters of choice and decision making.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu-pun yang bebas nilai termasuk dalam pendidikan.

2. Definisi Kedamaian dan Pendidikan Kedamaian

Damai berarti situasi tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman; tenteram; tenang; atau keadaan tidak bermusuhan; rukun. Sementara, kedamaian adalah keadaan damai; kehidupan dan sebagainya yang aman tenteram. Sedangkan perdamaian berarti penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya); perihal damai (berdamai). Selain itu, ada juga yang mempersyaratkan terciptanya kedamaian dengan tegaknya keadilan dalam kehidupan. Menurut Arkinson (1995: 655), damai itu tidak akan ada jika tidak ada keadilan “*No Peace Without Justice*”. Damai tidak dapat diukur dengan nilai nominal, terkadang damai dihubungkan dengan penataan kebebasan bagi orang-orang yang tertindas. Damai dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Jika ada damai maka harus ada keadilan, jika tidak ada keadilan, maka damai itu juga tidak ada.

Ada dua istilah yang sering digunakan yaitu *perdamaian* dan *kedamaian*. Menurut Galtung (2003: 21) terdapat dua pengertian tentang perdamaian, yaitu perdamaian adalah tidak adanya/ berkurangnya segala jenis kekerasan dan perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan. Untuk kedua pengertian tersebut maka perlu adanya kerja perdamaian yaitu kerja yang mengurangi kekerasan dengan cara-cara damai. Di samping itu, ada juga studi perdamaian adalah studi tentang kondisi-kondisi kerja perdamaian. Zamroni sebagaimana dikutip Wulandari (2010: 71) menyatakan bahwa perdamaian adalah suatu kon-

disi adanya harmoni, keamanan (tidak terjadi perang), serasi, dan adanya saling pengertian. Perdamaian juga bisa diartikan suasana yang tenang dan tidak adanya kekerasan. Sedangkan kedamaian diartikan sebagai kondisi optimum keadaan damai (*state of being peace*) yang dinamis dan berdaya adaptasi secara adekuat terhadap perubahan lingkungan. Makna *perdamaian* menunjukkan proses *becoming* sedangkan *kedamaian* merupakan kondisi *being* melalui proses *becoming* (Kartadinata, 2015: 5). Dalam konteks ini, kedamaian lebih bermakna sebagai hasil yang memberikan dampak luas baik bagi individu, lingkungan sosial, masyarakat bangsa dan negara yang dicapai melalui proses perdamaian.

UNICEF memberikan penekanan bahwa *Peace education is an integral part of the UNICEF vision of quality basic education*. Sedangkan menurut International Peace Research Association (IPRA), pendidikan damai adalah proses memberdayakan orang dengan kecakapan, sikap, dan pengetahuan (*skills, attitude, and knowledge*) untuk: (1) membangun, memelihara dan memperbaiki hubungan di semua level dalam seluruh interaksi manusia (*to build, maintain, and restore relationships at all levels of human interaction*); (2) mengembangkan pendekatan positif terhadap cara untuk menangani konflik, dari level personal sampai tingkat internasional; (3) menciptakan lingkungan yang aman, baik lingkungan fisik maupun emosi yang mengayomi semua individu; (4) menciptakan sebuah dunia yang aman berdasarkan keadilan dan hak asasi manusia; (5) membangun sebuah lingkungan yang lestari dan menjaganya dari eksploitasi dan peperangan (Kartadinata, 2015: 67).

UNESCO dalam Kartadinata (2015: 60) menyatakan bahwa “*peace education refers to the process of promoting the knowledge, skills, attitude and values needed to bring about behavior change that enable children, youth, adults to prevent conflict and violence, both overt and structural; to resolve conflict peacefully and to create the condition conducive to peace, wheter at an intrapersonal, interpersonal, intergroup, national and international level.*” Menurut Laing seperti dikutip Kartadinata (2015: 9-10) mendefinisikan pendidikan kedamaian sebagai suatu usaha untuk merespon masalah konflik dan kekerasan pada skala global, nasional, lokal dan personal. Sedangkan Schmidt dan Freidman mengemukakan bahwa pendidikan kedamaian merupakan pembentukan keterampilan dan memberdayakan anak-anak untuk menemukan cara yang kreatif dan tidak merusak untuk menyelesaikan konflik dan hidup selaras dengan orang lain di sekitarnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa pendidikan kedamaian adalah pendidikan yang berupaya mempersiapkan dan membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk membangun kehidupan personal dan sosial yang damai baik pada lokal, nasional maupun internasional, menyelesaikan konflik secara damai dan menciptakan kondisi damai dalam hubungan interaksi dengan sesama di berbagai level kehidupan.

3. Kebijakan Pendidikan

Tilaar (2009: 7) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) atau organisasi

sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. Sedangkan Sudiyono dan Mustafa seperti dikutip Solichin (2015: 152) menyebut kebijakan merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga/instansi pemerintah yang berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Melihat kondisi Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan maka kebijakan pendidikan nasional memberikan acuan pelaksanaan pendidikan seperti yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 16 yang menyebutkan pentingnya pendidikan berbasis masyarakat sebagai penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Semua itu ditujukan untuk mengakomodir kepentingan seluruh warga negara Indonesia serta mengantisipasi agar tidak terjadi konflik. Hal ini dipertegas dengan aturan kurikulum pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya harus memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Meski demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan belum secara eksplisit menyebutkan pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan persaudaraan antar sesama anggota masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan dalam hal suku, agama, ras, golongan, bahasa dan lain sebagainya. Keberadaan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Multikultural masih dianggap kurang memberikan kesadaran akan pentingnya kedamaian. Salah satu penyebabnya karena implementasinya hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan tanpa menekankan pada pengembangan sikap dan melatih peserta didik menjadi pribadi yang damai baik bagi diri sendiri maupun dalam hubungan dengan lingkungan sekitar.

Kebijakan yang dihasilkan mungkin saja telah mempertimbangkan aspek keragaman bangsa Indonesia, namun dalam pelaksanaan atau implementasinya sering terkendala dari pemahaman rumusan kebijakan atau pada pelaksana kebijakan yang kurang mampu menerjemahkan maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Menurut Arif Rohman (2009: 147), ada 3 (tiga) faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Perumus dan Hasil Rumusan Kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan pada hasil rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kejelasan kalimat, sarannya, kemudahan interpretasi, dan tingkat kesulitan pelaksanaan;
2. Pelaksana Kebijakan. Pelaksana kebijakan meliputi tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan, serta kemampuan kerjasama pelaksana kebijakan. Selain itu, latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi akan mempengaruhi cara kerja secara kolektif dalam mengimplementasikan kebijakan; dan
3. Pengorganisasian. Sistem organisasi pelaksana meliputi jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organis-

asi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

Dengan demikian, keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan akan sangat bergantung pada faktor-faktor dalam implementasi kebijakan. Sebab tujuan implementasi kebijakan adalah tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan. Sebagaimana pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Rohman (2009: 134), bahwa implementasi kebijakan merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (pejabat-pejabat) atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Sehingga keberhasilan kebijakan ditentukan pada pemahaman dan pelaksanaan pada level operasional.

C. Heterogenitas: Sebuah Realitas Masyarakat Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman dan heterogenitas masyarakat dalam pelbagai aspeknya. Keragaman suku, agama, ras dan golongan serta bahasa yang begitu bervariasi menempatkan Indonesia sebagai negara yang kaya dengan nilai budaya, nilai religi, dan nilai-nilai luhur lainnya. Hal ini terjadi karena secara geografis, Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan deretan pulau-pulau yang kaya akan budaya, adat dan tradisi kultural. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Papua tentu saja memiliki kekhasan masing-masing. Menurut Geertz dalam Iqbal (2014: 89) bahwa masyarakat Indonesia memiliki rentang struktur sosial yang lebar, seperti sistem-sistem Melayu Polinesia di pedalaman Kalimantan dan Sulawesi, ibukota-ibukota provinsi baik kota kecil maupun metropolitan dengan aneka ragam sistem stratifikasi atau aturan-aturan sosial, adat dan tradisi dan aturan religi yang dianut dan dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa secara historis, masyarakat Indonesia sejak dahulu hidup dalam lingkungan yang plural. Pluralitas tersebut nampak dalam bahasa, struktur sosial, tradisi keagamaan dan nilai-nilai luhur yang dianut. Menurut para arkeolog, keragaman ini terwujud dalam tiga aspek kehidupan yaitu, teknologi, organisasi sosial dan religi (Iqbal, 2014: 90). Dalam hal teknologi terlihat dari penggunaan alat dan media dalam kehidupan sehari-hari. Banyak di antara masyarakat Indonesia mengalami perkembangan dalam penggunaan alat dan media yang berbeda tergantung pada kemajuan peradaban pada wilayah tersebut, misalnya wilayah Indonesia barat, tengah dan timur. Perkembangan ini menghasilkan perbedaan antara orang di pedalaman Papua atau pedalaman Kalimantan dengan orang yang ada di kota metropolitan. Demikian pula dalam organisasi sosial, dimana terjadi pengelompokan masyarakat Indonesia dalam struktur sosial tertentu yang terbentuk dari interaksi sosial masyarakat. Dalam aspek kehidupan religi, keragaman terlihat dari keyakinan yang dianut. Hal ini bisa berwujud ibadah atau ritual, pakaian atau busana khas, serta kekhasan religi yang memberikan simbol heterogenitas masyarakat Indonesia.

Geertz sebagaimana dikutip Iqbal (2014: 89) mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negeri tempat arus kultural sepanjang tiga milenia mengalir. Arus kultural yang masuk ke Indonesia diantaranya India, China, Timur Tengah

dan Eropa. Kultur yang masuk ini teridentifikasi dari komunitas-komunitas yang ada di beberapa daerah di Indonesia seperti komunitas Muslim yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Nusantara dengan mayoritas komunitas berada di pulau Sumatera dan Jawa. Komunitas Hindu di Bali, China di Surabaya, Semarang dan sejumlah komunitas di beberapa daerah lain serta Minahasa dan Ambon yang didominasi komunitas agama Kristen Protestan dan Katolik di Flores Nusa Tenggara. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai *mega cultural diversity* atau negara dengan keragaman kultur yang sangat besar.

Keragaman dan kekayaan Indonesia ini selayaknya memberi keuntungan bagi pembangunan nasional. Semua golongan, ras, dan penganut agama bersatu padu dengan semangat kebersamaan membangun negeri tercinta. Namun pada kenyataannya, konflik antar suku, golongan, komunitas yang berbeda bahkan konflik bernuansa agama seperti konflik Ambon dan Poso seakan mewarnai Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Lingkaran Survei Indonesia dan Yayasan Denny J.A. seperti dikutip Iqbal (2104: 93) mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasa tidak nyaman jika hidup berdampingan dan bertetangga dengan yang berbeda termasuk berbeda agama.

Hal ini juga didukung pada fakta bahwa pada tahun 2014, SETARA Institute mencatat bahwa terdapat 122 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan berbagai bentuk tindakan yang menyebar di beberapa provinsi. Demikian pula, laporan versi The Wahid Institute yang mendata 154 kasus peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, sedangkan laporan Komnas HAM menunjukkan ada 67 berkas laporan di tahun 2014 dan catatan Lembaga Study & Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang menemukan 52 peristiwa yang masuk ke pengadilan (<http://elsam.or.id>). Belum lagi kasus-kasus yang muncul pada tahun 2015 dan 2016 dimana pelanggaran terhadap kebebasan untuk menjalankan ajaran agama yang tertuang dalam kitab suci selalu terjadi dan tidak jarang melibatkan publik figur dan tokoh pemerintahan, seperti kasus dugaan penistaan agama yang ramai menjadi isu nasional pada akhir 2016.

Tentu saja, Indonesia harus segera bergerak untuk merumuskan langkah solutif melalui proses pendidikan. Belajar melakukan kajian komparatif dengan Malaysia dalam menata perbedaan etnik dengan mengedepankan keterbukaan dalam hubungan lintas etnik dan agama seperti penelitian Tamring pada etnik di Sabah yang dikutip Abdul Rahman (2013: 89). Demikian juga penelitian Jinguang (2003, 205-206), di China yang juga memiliki keragaman. Selain pemeluk Taoism dan Budha sebagai pemeluk agama terbesar, China juga memiliki sekitar 20 juta jiwa pemeluk Islam, lebih dari 20,3 juta pemeluk Protestan dan 5 juta pemeluk Katolik. Mereka dapat hidup dengan rukun dan damai dalam berinteraksi di masyarakat, karena mereka menghormati perbedaan serta mampu hidup berdampingan secara damai (*harmony but difference, mutual appreciation and peaceful coexistence*). Terkait hal ini, Berry (2005: 698-699) mengusulkan sebuah pola psikologis dalam menjalin relasi kelompok yang memadukan antara akulturasi dan relasi antar etnik. Menurut Berry, psikologi dalam relasi kelompok dipengaruhi oleh faktor kultural, ekonomi, historis, dan politik. Akulturasi dan relasi antar etnik berpotensi menghasilkan harmoni kehidupan yang efektif atau juga konflik.

Kondisi bangsa Indonesia yang demikian majemuk dengan berbagai perbedaan ini seharusnya perlu untuk mengedepankan pentingnya pendidikan kedamaian sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional. Peserta didik harus ditanamkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitarnya dan usaha itu harus dimulai dari program pendidikan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Model pendidikan yang menitikberatkan pada kemampuan peserta didik bersikap lebih menghargai sesama dan mengutamakan musyawarah dibanding tindakan yang berujung pada perpecahan bangsa.

D. Pembahasan

1. Kebijakan Pendidikan dan Urgensi Kedamaian pada Masyarakat Heterogen

Dalam melakukan analisis kebijakan, Dunn dalam Suryadi (2009: hlm. 53) membagi analisis kebijakan menjadi dua dimensi besar yaitu dimensi rasional yaitu analisis yang menghasilkan informasi teknis dan dimensi politik yaitu suatu proses penentuan kebijakan melalui suatu interaksi politik dari beberapa kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Patton dan Sawacki (Suryadi, 2009: 55) analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah suatu proses terjadi yang berkelanjutan yang ditandai dengan proses interaksi antara pembuat keputusan dengan para pemikir atau analis dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang terjadi secara berkelanjutan pula. Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Sehingga kebijakan pendidikan perlu dianalisis dengan berbagai pertimbangan, di antaranya relevansi kebijakan dengan situasi dan kondisi, adanya permasalahan yang menuntut perubahan kebijakan atau juga sebagai bagian dari antisipasi terhadap situasi yang akan terjadi dalam dunia pendidikan.

Dalam kaitan dengan kebijakan pendidikan, pemerintah telah melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta peraturan lain yang sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang pentingnya pendidikan kedamaian dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan mengantisipasi konflik. Pada muatan kurikulum baik pendidikan dasar, menengah dan kurikulum pendidikan tinggi juga tidak menyebutkan secara jelas tentang pentingnya pendidikan kedamaian dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Sebagian kalangan menganggap bahwa materi pendidikan kedamaian sudah bisa dimasukkan secara integratif dalam pendidikan Agama, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan Pendidikan Multikultural, akan tetapi kenyataannya bidang studi tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak memiliki kesatuan gerak untuk mewujudkan masyarakat heterogen yang damai.

Tilaar seperti dikutip Gonibala (2013: 284) menjelaskan bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal,

diantaranya pendidikan multikultural haruslah berdimensi “*right to culture*” dan identitas lokal. Selain itu, pendidikan multikultural normatif yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi *basic* tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada dan menempatkan kebudayaan Indonesia sebagai bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Inilah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang heterogen untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis melalui proses pendidikan.

Heterogenitas masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan golongan dapat memberikan dampak bagi pembangunan, sehingga perlu dikelola dengan baik. Heterogenitas masyarakat Indonesia, dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Ia dapat menjadi faktor pendukung ketika perbedaan-perbedaan tersebut dapat dioptimalkan semaksimal mungkin dalam proses pembangunan bangsa. Misalnya, perbedaan agama yang ada dalam masyarakat perlu dikelola dengan cara menjalin kerja sama antar pemeluk agama melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti kerja sama dalam bidang sosial dan ekonomi, bahkan dalam menjaga ketenteraman hidup dan memperkokoh jalinan persaudaraan antar umat beragama dari ancaman konflik dan pertikaian yang sering kali menjadi tantangan dalam masyarakat heterogen. Sebagai contoh, Kota Manado dengan motto “*Torang Samua Basudara*” telah menjadi perekat hubungan antar masyarakat yang berbeda agama, suku dan budaya yang ada di Sulawesi Utara. Demikian pula di daerah lain, tentu saja memiliki kekhasan tersendiri yang menjadi kekayaan nusantara dalam membangun kehidupan yang damai.

Sebaliknya, heterogenitas masyarakat Indonesia dapat menjadi faktor penghambat pembangunan bangsa ketika perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan konflik horizontal antara suku, agama, ras dan golongan. Hal ini pernah dialami Indonesia dan menjadi pengalaman buruk dalam sejarah kehidupan bangsa. Bentrokan dan konflik yang berlatar belakang suku, agama, ras dan golongan terjadi beberapa daerah seperti Papua, Ambon, Poso, dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Tentu saja hal ini menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan bangsa di segala bidang.

Oleh karena itu, heterogenitas masyarakat Indonesia yang bisa memberikan dampak bagi pembangunan bangsa perlu dikelola dengan baik, termasuk melalui proses pendidikan. Pendidikan merupakan cara yang relevan dalam menanamkan kesadaran hidup yang damai dalam perbedaan. Menurut Yusuf (2013: 225) *education is fundamental to peace building*, sehingga pendidikan perlu diarahkan untuk membangun kedamaian hidup masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya kebijakan pendidikan yang mempertimbangkan aspek heterogenitas.

Kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan aspek heterogenitas bangsa Indonesia dengan mengatur tentang implementasi pendidikan kedamaian dalam menanamkan pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang kedamaian bangsa, mengantisipasi konflik dan menangani konflik secara damai. Ada beberapa alasan mengapa Pendidikan Kedamaian (*Peace Education*) mendesak diselenggarakan pada lembaga pendidikan formal di Indonesia, di antaranya untuk

mensosialisasikan pentingnya hidup aman dan damai dalam perbedaan. Selain itu, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Multikultural tidak menyentuh aspek-aspek teknis tentang program, proses dan langkah antisipasi serta penanganan konflik. Selanjutnya lingkungan pendidikan terkesan mengabaikan pentingnya membina sikap hidup yang rukun dan damai sejak dari sekolah baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam interaksi di lingkungan sekolah. Dengan alasan tersebut, pendidikan kedamaian perlu di-kedepankan dalam rangka mengantisipasi konflik dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Pendidikan Kedamaian sebagai Penguatan Karakter Bangsa

Dunia pendidikan terus mendapatkan kritik terkait masih terjadinya dikotomi antara pendidikan pada aspek intelektual dengan pendidikan nilai yang menyangkut aspek afektif. Kecerdasan intelektual lebih dipentingkan dibanding dengan kecerdasan emosional, sosial dan kecerdasan spiritual yang baik. Sehingga seringkali anak Indonesia menjuarai Olimpiade sains, matematika, fisika, kimia dan lain-lain baik di tingkat regional maupun internasional. Padahal aspek afektif, pengembangan nilai dan karakter merupakan aspek penting dalam pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan kita mementingkan *supremacy* dibanding *capacity*. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan masih terfokus pada pengajaran sisi kognitif dibanding membina dan mengembangkan nilai dan karakter agar peserta didik mampu merespon dan menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi dalam kehidupan.

Suryadi (2014: 95) menegaskan bahwa solusi terhadap permasalahan karakter bangsa akan terwujud ketika pendidikan memiliki mutu yang tinggi. Pendidikan yang bermutu menawarkan program dan strategi bagi tumbuhnya karakter individu maupun kelompok. Oleh sebab itu, pendidikan harus memiliki visi dan misi pembinaan karakter. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter tidak dapat dilakukan dalam suatu ruang hampa (*vacuum tube*) yang bebas nilai sebab karakter berkaitan erat dengan kehidupan.

Karakter dasar bangsa Indonesia telah dikenal di seluruh penjuru dunia sebagai bangsa yang damai. Semua akan setuju bila menyebut orang Indonesia identik dengan individu yang ramah tamah, murah senyum, peduli, saling tolong menolong, dan lain-lain. Namun perlahan karakter itu mulai luntur sering konflik dan benturan antar kelompok masyarakat yang terjadi beberapa tahun terakhir. Kondisi ini seharusnya menjadi keresahan bersama seluruh komponen bangsa termasuk bagi dunia pendidikan. Sehingga penguatan kembali nilai-nilai karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang damai sangat penting untuk digalakkan kembali melalui proses pendidikan.

Mukhibat (2012: 247) menyebutkan bahwa pendidikan karakter menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional karena pendidikan pendidikan karakter telah diposisikan menjadi salah satu langkah untuk menyembuhkan penyakit sosial. Salah satu penyakit sosial yang sering terjadi adalah pelanggaran norma dan aturan yang berujung pada konflik dan perpecahan. Oleh sebab itu, pendidikan karakter perlu diperkuat dengan pengembangan nilai-nilai kemanu-

siaan yang mendorong terciptanya hidup yang damai dan harmonis.

Pendidikan di Indonesia seharusnya mampu untuk menjadikan peserta didik untuk hidup bersama dalam perbedaan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Pendidikan perlu menanamkan karakter dan sikap hidup yang baik sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara pada peserta didik. Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Makna pendidikan di atas, menuntut upaya aktif dalam mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan pengendalian diri serta keterampilan penting yang akan digunakan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan perlu mempersiapkan individu untuk hidup bersama dengan individu yang lain dalam kedamaian. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar pendidikan UNESCO yaitu *learning to live together* (belajar untuk hidup bersama).

Gonibala (2013: 286) menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pendidikan sebagai institusi yang menghormati dan menghargai perbedaan. *Pertama*, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*) yang didalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka terutama dalam proses belajar mengajar. *Kedua*, konstruksi ilmu pengetahuan (*Knowledge construction*) yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif keragaman, kebersamaan, dan kerjasama. *Ketiga*, pengurangan prasangka (*prejudice reduction*) yang lahir dari interaksi antar keragaman, kebersamaan, dan kerjasama dalam kultur pendidikan yang terbuka. *Keempat*, pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*) yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap elemen yang beragam. *Kelima*, pemberdayaan budaya sekolah (*empowering school culture*). Kerukunan umat beragama menjadi modal sosial dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis multikultural.

Selain itu, Kidder (Majid dan Andayani, 2010: 36-37) menyampaikan tujuh kualitas yang diperlukan dalam pendidikan termasuk didalamnya penguatan karakter, yang diberika nama *Seven E's* (*Empowered, Effective, Extended in to the community, Embedded, Engaged, Epistemological, Evaluative*).

1. *Empowered* (pemberdayaan). Pendidik harus mampu memberdayakan dirinya untuk memberikan pendidikan karakter dengan dimulai dari diri sendiri.
2. *Effective*, proses pendidikan harus dilaksanakan dengan efektif dalam arti berhasil dan bermanfaat sesuai dengan harapan.
3. *Extended into the community*, komunitas harus membantu dan mendukung sekolah dalam menanamkan nilai-nilai.
4. *Embedded*, mengintegrasikan seluruh nilai ke dalam kurikulum dan

seluruh rangkaian proses pembelajaran.

5. *Engaged*, melibatkan komunitas dan menampilkan topik-topik yang esensial.
6. *Epistemological*, harus ada koherensi antara cara berpikir makna etik dengan upaya yang dilakukan untuk membantu peserta didik menerapkannya secara benar.
7. *Evaluative*, menilai sikap peserta didik dalam aktifitasnya setelah memahami dan menghayati suatu nilai.

Oleh karena itu, Lickona (Suryadi, 2010: 412) menawarkan enam elemen penting dalam membentuk suatu budaya lingkungan pendidikan yang memungkinkan untuk terbentuknya nilai, sikap dan perilaku positif, yaitu :

1. *Moral and academic leadership from principal.*
2. *Schoolwide discipline that models, promotes, and upholds the school's values in all school environment.*
3. *A schoolwide sense of community.*
4. *A moral atmosphere of mutual respect, fairness, and cooperation that pervades all relationship-those among the adults in the school as well as those between adults and students.*
5. *Elevating the importance of morality by spending school time on moral concern.*

Keenam elemen yang diungkapkan Lickona yaitu, keterlibatan pimpinan lembaga pendidikan, penegakan disiplin dalam lingkungan pendidikan, adanya rasa kekeluargaan dalam sekolah sebagai satu komunitas, penghargaan, keadilan dan kerjasama antara peserta didik dan pengelola, serta adanya waktu untuk menangani masalah-masalah moral. Enam elemen ini akan menjadi penopang terbentuknya pembinaan perilaku positif di lingkungan pendidikan jika dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab baik oleh pimpinan dan seluruh elemen di lembaga pendidikan.

Posisi pendidikan sebagai sarana penguatan karakter makin diperkuat dengan penelitian Yusuf (2013) dari *Department of Educational Foundation and Curriculum Faculty of Education Ahmadu Bello University Zaria*, Nigeria, mengemukakan bahwa *Education should "foster universal and external values, oriented towards the unity and integration of our people"* Pendidikan harus "mendorong nilai-nilai universal dan eksternal, berorientasi pada persatuan dan integrasi rakyat". Sehingga pendidikan mewadahi proses interaksi dalam perbedaan yang ada dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Pendidikan harus menjadi sarana untuk mendorong nilai-nilai kemanusiaan termasuk nilai kedamaian.

Kondisi bangsa Indonesia yang demikian majemuk dengan berbagai perbedaan ini seharusnya perlu untuk mengedepankan pentingnya internalisasi nilai kedamaian sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional. Peserta didik harus ditanamkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitarnya dan usaha itu harus dimulai dari program pendidikan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Model pendidikan yang menitikberatkan pada kemampuan peserta didik bersikap lebih toleran dan menghargai sesama dalam perbedaan baik suku, agama ras dan golongan.

Bila kita mencermati lingkungan pendidikan (sekolah), masih banyak kebijakan dan tindakan yang belum mencerminkan sikap menghargai perbedaan khususnya dalam menjalankan agama. Sebagai contoh, anak yang menggunakan busana muslimah ke sekolah masih ada yang mendapat teguran dari guru dengan alasan tidak sesuai seragam sekolah. Belum lagi hak untuk mendapatkan pelajaran agama dari guru yang seagama baik di sekolah negeri maupun swasta. Dalam interaksi di lingkungan pendidikan peserta didik masih mendapatkan perlakuan yang kurang baik terkait pakaian yang mencerminkan ajaran agamanya, ada yang di *bully* karena menggunakan busana yang berbeda sehingga tidak jarang terjadi benturan antara peserta didik. Bila hal ini dibiarkan maka akan semakin menjadi kebiasaan dan bisa saja berkembang ke lingkungan masyarakat sehingga akan berdampak buruk bagi hubungan antar umat beragama.

Di samping itu, Muhammad (2008: 36) menyatakan bahwa masih ada budaya stigma negatif bagi etnis dan agama tertentu. Perbedaan suku dan golongan juga masih melahirkan sikap yang kurang toleran baik secara lisan maupun dalam bentuk tindakan antara sesama peserta didik. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat menjadi sumber konflik. Meskipun hanya berupa obrolan ringan, *lelucon* antara peserta didik dalam pergaulan namun lama kelamaan bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam melahirkan konflik mulai dari lingkup yang kecil sampai lingkup besar.

Di sinilah pentingnya peran pendidikan dalam memberikan pemahaman akan pentingnya hidup bersama secara damai, toleransi beragama, menghargai perbedaan keyakinan, perbedaan suku dan golongan, menghormati keragaman dan heterogenitas masyarakat, serta menghindari terjadinya konflik sejak dini, mengantisipasi terjadinya benturan sekecil apapun sehingga harapan untuk kehidupan yang aman dan damai dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya yang terstruktur melalui pendidikan untuk mengantisipasi konflik antar golongan masyarakat yang berbeda baik suku, agama, ras dan golongan tertentu. Salah satu yang perlu dikedepankan adalah pendidikan yang menanamkan pentingnya hidup secara damai dalam perbedaan agama, hidup yang harmonis sesama pemeluk agama, bersahabat dan berinteraksi dengan baik meski berbeda suku dan golongan. Di samping itu, pendidikan juga perlu merumuskan cara mengantisipasi konflik, bagaimana menghadapi konflik dan mengatasinya serta upaya untuk menjaga nilai-nilai kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat yang heterogen.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa pendidikan kedamaian yang mendorong kehidupan bangsa yang aman, tentram dan harmonis perlu diimplementasikan dan dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional sebagai bentuk penguatan pada pendidikan karakter. Implementasi pendidikan kedamaian perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) Tujuan yang ingin dicapai; (2) Materi apa yang disiapkan; (3) Metode dan Strategi Belajar; (4) Media yang digunakan; dan (5) Evaluasi pembelajaran. Tujuan pendidikan kedamaian di Indonesia seharusnya diarahkan pada penanaman pengetahuan, pemahaman, kesadaran, sikap, dan keterampilan peserta didik tentang pentingnya kedamaian hidup. Peserta didik harus mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi, lingkungan

keluarga dan masyarakat. Materi yang disampaikan akan berkisar pada beberapa hal penting seperti: pengertian kedamaian, manfaat kedamaian, dampak buruk konflik, cara membangun kehidupan yang damai dan harmonis, cara mengantisipasi konflik dan cara menyelesaikan konflik secara damai. Kontennya bersumber dari nilai-nilai agama, nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Selain itu, implementasi pendidikan kedamaian perlu disampaikan dengan metode dan strategi pembelajaran aktif dengan variasi metode dan teknik yang disesuaikan dengan materi dengan berorientasi pada pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sedangkan media pembelajaran dapat bersumber dari lingkungan sekitar, kemudian dilakukan evaluasi pembelajaran dengan memberikan penekanan pada kemampuan aplikatif peserta didik dalam sikap hidup dan kemampuan untuk merespon situasi dan masalah secara damai.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam mengimplementasikan pendidikan kedamaian. *Pertama*, penerapan Pendidikan Kedamaian sebagai bagian dari upaya mensosialisasikan pentingnya hidup aman, rukun dan damai di tengah perbedaan. Salah satu tujuan pendidikan yaitu menciptakan individu yang mampu hidup bersama dalam perbedaan masyarakat secara damai (*peaceful co-existence*), sehingga pendidikan kedamaian begitu penting dalam memberikan pemahaman bagi peserta didik tentang makna hidup bersama dengan orang lain dalam perbedaan (*harmony in diversity*). Meskipun beberapa ahli telah mengemukakan konsep pendidikan kedamaian, seperti Kartadinata (2015: iv) yang mengemukakan bahwa penerapan pendidikan kedamaian perlu dikembangkan melalui pesan dan target pembelajaran tersembunyi (*hidden curriculum*). Sungguh tidak memadai bila pendidikan kedamaian hanya sekedar *hidden curriculum*, akan tetapi perlu menjadi bagian dari mata pelajaran atau topik bahasan secara khusus. Hal ini penting, sebab salah satu tujuan pendidikan adalah belajar untuk hidup bersama (*learning to live together*) sebagaimana yang diamanatkan UNESCO. Selain itu, tujuan pendidikan nasional juga ingin membentuk individu menjadi warga negara yang baik. UNESCO menyatakan bahwa "*peace education refers to the process of promoting the knowledge, skills, attitude and values needed to bring about behavior change that enable children, youth, adults to prevent conflict and violence ...*". Sejalan dengan itu, Galtung (2008: 2) menyatakan bahwa pendidikan kedamaian harus berusaha untuk menghilangkan kekerasan. Sehingga pendidikan kedamaian akan merupakan suatu langkah preventif bagi penanganan konflik. Indonesia telah mengalami konflik horizontal dengan berbagai isu, sehingga sudah saatnya untuk merancang suatu strategi pendidikan yang lebih menekankan pada pentingnya kehidupan masyarakat yang damai di tengah heterogenitas dan pluralisme bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Intinya, pendidikan kedamaian perlu diselenggarakan untuk mengarahkan peserta didik tentang pentingnya kehidupan bersama secara harmonis dalam perbedaan.

Kedua, Pendidikan Agama sejauh ini telah mengajarkan tentang nilai-nilai agama dalam perspektif masing-masing agama, demikian pula Pendidikan Kewarganegaraan juga telah mengajarkan bagaimana menjadi warga negara

yang baik, serta Pendidikan Multikultural yang mengenalkan peserta didik tentang keberagaman kultur masyarakat Indonesia, akan tetapi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Multikultural belum menyentuh pada aspek teknis “apa itu kedamaian?”, “bagaimana menjaga kedamaian?”, “apa manfaat kedamaian?”, “apa yang dilakukan dalam mengantisipasi konflik dan bagaimana cara mengatasi konflik secara damai?”. Di sinilah pentingnya Pendidikan Kedamaian dikedepankan untuk menopang Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Multikultural serta menjadi penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia.

Ketiga, Sekolah tidak begitu peduli dengan pentingnya pendidikan kedamaian. Nilai-nilai kerukunan yang diajarkan di kelas dalam beberapa materi pelajaran hanya bersifat informasi semata tanpa ada upaya untuk menjadikan peserta didik menghayati dan bersikap rukun dan damai dalam berinteraksi. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat program kegiatan bersama dalam lingkungan sekolah yang menitikberatkan pada penanaman nilai kerukunan dan kedamaian, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Selain itu, sekolah dapat membentuk Kelompok Cinta Damai (*Peace-loving Group*) di setiap kelas yang berisikan perwakilan dari suku, agama, golongan atau komunitas tertentu. Kelompok ini dapat menjadi miniatur perdamaian di lingkungan sekolah serta ikut memberikan pemahaman secara terus menerus tentang pentingnya hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan kedamaian kepada sesama peserta didik bahkan ke lingkungan sekitar dalam program ekstrakurikuler. Mengontrol dan meminimalisir aksi-aksi intoleran di lingkungan sekolah, menegur, dan menyelesaikan masalah sendiri secara damai. Pendeknya, kelompok pencinta damai ini yang akan berada di garda terdepan dalam mengantisipasi terjadinya konflik mulai dari lingkungan terkecil.

E. Kesimpulan

Heterogenitas masyarakat Indonesia perlu diarahkan dan dikembangkan untuk kemajuan bangsa. Oleh karenanya, semangat kedamaian, menghormati dan menghargai perbedaan, bekerja sama, menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dalam iklim yang kondusif sebagai kekuatan karakter bangsa perlu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan terencana dengan baik melalui pendidikan. Kebijakan Pendidikan nasional telah memberikan ruang bagi heterogenitas masyarakat Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, akan tetapi kebijakan tersebut tidak secara eksplisit mengedepankan pendidikan kedamaian sebagai upaya menjaga harmonisasi dan kedamaian hidup. Oleh karena itu, Pendidikan Kedamaian perlu dikedepankan sebagai penguatan pembangunan Karakter bangsa yang telah dilaksanakan dalam Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Multikultural di Indonesia. Pendidikan Kedamaian dapat diupayakan dengan penanaman nilai-nilai agama dan budaya yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang lebih aplikatif.

Internalisasi nilai kedamaian melalui pendidikan kedamaian dalam penguatan pembangunan karakter bangsa dapat diupayakan dengan beberapa lan-

gkah yaitu. *Pertama*, penerapan Pendidikan Kedamaian sebagai bagian dari upaya mensosialisasikan pentingnya hidup aman, rukun dan damai di tengah perbedaan serta sebagai sarana untuk mewujudkan salah satu tujuan pendidikan yaitu menciptakan individu yang mampu hidup bersama (*live together*) dalam perbedaan masyarakat secara damai (*peaceful co-existence*). *Kedua*, menjadikan pendidikan kedamaian sebagai penguatan mata pelajaran/ bidang studi yang sudah ada seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Multikultural. *Ketiga*, perlu adanya program sekolah berupa kegiatan bersama dalam lingkungan sekolah yang menitikberatkan pada penanaman nilai kerukunan dan kedamaian, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Selain itu, sekolah dapat membentuk Kelompok Cinta Damai (*Peace-loving Group*) di setiap kelas yang berisikan perwakilan dari suku, agama, golongan atau komunitas tertentu, juga dengan menghidupkan budaya sekolah yang toleran dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Nur F., Khambali, Khadijah M. 2013. "Religious Tolerance in Malaysia: Problems and Challenges", *International Journal of Islamic Thought*, 3: 81-91.
- Arkinson. David J. & H. Field. 1995. *New Dictionary Of Christian Ethics And Pastoral Theology*, England: Intervarsity.
- Berry, J.W. 2005 "Acculturation: Living Succesfully in two Cultures", *International Journal of Intercultural Relations*, 29: 697-712.
- Bloom, Benjamin .S. et.al. 1971. *Taxonomy of Education Objective Book 2 Affective Domain*, New York: David McKay Company. Inc.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Galtung, Johan. 2008, *Encyclopedia of Peace Education*, Teachers College, Columbia University.
- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Gonibala, Rukmina. 2013. Pendidikan Berbasis Multikultural Sebagai Modal Sosial Kerukunan Umat Beragama (Konteks Sulawesi Utara). *Jurnal Potret Pemikiran*, 17 (2): 275-287.
- Hakam, Kama Abdul. dan Nurdin, Encep Syarif. 2015. *Modul Pelatihan Metodologi Pembelajaran Internalisasi Nilai-nilai*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, Badan Pengembangan & Pemberdayaan SDM Kesehatan, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. 2014, "Pendidikan Multikultural Interteligius: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia", *Jurnal Sosio Didaktika*, 1 (1): 89-98.
- Jinguang, Liu. 2003. "The Tolerance and Harmony of Chinese Religion in the Age of Globalization", *Procedia – Social and Behavioral Sciences* (77), 205-209.
- Kartadinata, Sunaryo. dkk. 2015. *Pendidikan Kedamaian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kneller, George F. 1971. *Introduction to Philosophy of Education*. New York, Chichester, Brisbane, Toronto: John Wiley & Sons.
- Lickona, Thomas. 1992. *Educating for Character (How Our School can Teach Respect and Responsibility)*. New York: Bantam Books.
- Majid, Abdul. dan Andayani, Dian. 2010. *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*. Bandung: Insan Cita Utama.
- Mukhibat. 2012. Reinventing Nilai-nilai Islam, Budaya, dan Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Karakter, *Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (2): 247-265.
- Muhammad, F. 2008. Mendidik Anak Berbudaya dan Berperadaban (Online) (<http://daaruttauhid.multiply.com/journal/item/1/>) diakses 23 Mei 2016.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003* tentang Sistem

- Pendidikan Nasional. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kementerian Agama RI.
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: LaksBang Media-tama.
- Solichin, M. 2015. "Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi", *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6 (2): 148-178.
- Suryadi, Ace & Budimansyah, Dasim. 2009, *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Suryadi, Ace. 2014, *Pendidikan Indonesia menuju 2025, Outlook: Permasalahan, Tantangan & Alternatif Kebijakan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, Ace. 2010. "Sebuah Model Pendidikan Karakter dalam Sistem Persekolahan di Indonesia", dalam *Potret Profesionalisme Guru dalam Membangun Karakter Bangsa: Pengalaman Indonesia dan Malaysia*. Bandung: UPI Press.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- The United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals*, The United Nations Summit, 2015 (Online) (<https://sustainabledevelopment.un.org>) diakses 10 Desember 2016.
- Tilaar, H.A.R. 2009, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wulandari, Taat. 2010. "Menciptakan Perdamaian melalui Pendidikan Perdamaian di Sekolah", *Mozaik. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 5 (1): 68-83.
- Yusuf, H.A. 2013. "Promoting Peaceful Co-Existence and Religious Tolerance through Supplementary Readers and Reading Comprehension Passages in Basic Education Curriculum". *International Journal of Humanities and Social Science*, 3 (8).
- <http://elsam.or.id>). diakses 15 Desember 2016.

